

Pendanaan Visi Indonesia 2045

Ringkasan Eksekutif



Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Ringkasan Eksekutif

I. Perkembangan Ekonomi Terkini

Perekonomian Indonesia tetap tangguh, didukung oleh permintaan dalam negeri yang kuat dan sektor jasa yang mulai pulih. PDB tumbuh sebesar 5 persen sepanjang tahun ini, didukung oleh konsumsi swasta dan belanja pemerintah yang kuat. Sektor jasa, secara keseluruhan, tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, sementara sektor manufaktur menunjukkan hasil yang beragam. Inflasi turun secara bertahap seiring dengan menurunnya harga pangan dan energi, dengan inflasi tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) turun menjadi 1,5 persen pada bulan November. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi pertanian dan penurunan harga minyak global. Pasar tenaga kerja turut menunjukkan ketangguhan, seiring dengan turunnya tingkat pengangguran secara umum dan naiknya partisipasi angkatan kerja, khususnya bagi perempuan. Namun, lambatnya pemulihan upah riil dan penciptaan lapangan kerja kelas menengah bagi usia muda tetap menjadi tantangan.

Defisit transaksi berjalan melebar, didorong oleh moderasi nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) dan faktor musiman (*cyclical factors*) yang meningkatkan arus keluar jasa dan pendapatan. Surplus perdagangan barang mengecil karena penurunan harga komoditas dan pelonggaran beberapa pembatasan impor. Sementara itu, peningkatan impor perjalanan memperlebar defisit perdagangan jasa. Namun, pelonggaran moneter global dan kondisi makro yang stabil di Indonesia telah meningkatkan arus modal masuk, memperkuat cadangan devisa, dan meredakan tekanan terhadap Rupiah. Sementara itu, indikator prudensial sektor perbankan tetap sehat, namun masih ada ruang untuk meningkatkan kedalaman sektor keuangan.

Setelah dua tahun konsolidasi, kebijakan fiskal sedikit melonggar. Defisit fiskal pada tahun 2024 diperkirakan melebar menjadi 2,7 persen dari PDB, naik dari 1,6 persen pada tahun 2023. Pergeseran ini disebabkan oleh penurunan penerimaan dari sektor komoditas dan pajak, serta peningkatan belanja untuk bantuan sosial dan proyek-proyek infrastruktur. Meskipun defisit melebar, jumlah utang publik sedikit menurun menjadi 38,5 persen dari PDB, dengan sebagian besar utang dalam mata uang Rupiah, sehingga mengurangi risiko nilai tukar. Namun demikian, meningkatnya biaya layanan utang, yang diperkirakan mencapai 4,9 persen dari PDB di tahun 2024, menunjukkan perlunya mobilisasi penerimaan yang lebih besar untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung belanja yang berorientasi pada pertumbuhan.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) secara bertahap melonggarkan kebijakan moneternya sambil menjaga stabilitas mata uang. Pada bulan September, BI menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6,0 persen, memanfaatkan tren pelonggaran moneter global. Untuk mengurangi tekanan pada mata uang, BI terus menerbitkan instrumen moneter berimbang hasil tinggi, seperti SRBI, yang menarik banyak modal asing. Selain itu, BI memperkenalkan insentif makroprudensial baru untuk mendorong ekspansi kredit swasta, termasuk mengurangi rasio cadangan minimum (*reserve requirement ratios*) untuk sektor-sektor tertentu. Langkah-langkah ini telah mendorong pertumbuhan kredit sektor swasta, sesuai dengan kisaran target BI sebesar 10-12 persen.

Prospek ekonomi Indonesia tetap stabil dengan risiko yang seimbang. Perekonomian Indonesia

diproyeksikan tumbuh rata-rata 5,1 persen selama 2024-2027, didukung oleh peningkatan konsumsi dan investasi publik seiring dengan pelaksanaan bertahap program bantuan sosial dan investasi oleh pemerintahan baru. Inflasi diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran target BI tetapi dapat meningkat karena permintaan dalam negeri yang kuat dan kenaikan tarif PPN. Defisit transaksi berjalan diproyeksikan akan melebar, dengan arus masuk penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment*, FDI) tetap menjadi sumber utama pembiayaan eksternal. Kebijakan fiskal diproyeksikan tetap berada dalam ambang batas aturan fiskal, dengan rata-rata defisit anggaran sebesar 2,6 persen dari PDB selama periode proyeksi, didukung oleh reformasi perpajakan. Namun, biaya pinjaman yang tinggi juga diperkirakan akan menyebabkan pembayaran bunga tetap tinggi, sekitar 2,2 persen dari PDB. Prospek ini menghadapi risiko yang seimbang. Risiko negatif mencakup ketegangan geopolitik yang meningkat, dan potensi penundaan dalam reformasi fiskal dan struktural. Potensi risiko positif mencakup pemulihan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan di mitra dagang utama dan kenaikan harga komoditas utama.

Untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas. Pemerintah Indonesia menargetkan mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 dan menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 8 persen pada tahun 2028 melalui stimulus permintaan agregat yang signifikan. Strategi ini melibatkan peningkatan investasi swasta secara signifikan di berbagai sektor selama lima tahun ke depan, serta penerapan stimulus fiskal yang berfokus pada 17 program prioritas, termasuk beberapa inisiatif perlindungan sosial. Strategi ini juga melibatkan reformasi pajak untuk membiayai semua program fiskal tersebut sambil tetap mematuhi aturan

fiskal. Laporan ini mensimulasikan dampak strategi tersebut terhadap pertumbuhan jangka menengah Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa dampak dari peningkatan permintaan ini sangat bergantung pada reformasi struktural yang menyertainya. Tanpa adanya reformasi struktural, ekonomi dapat menghadapi inflasi yang tinggi dan ketidakseimbangan makroekonomi lainnya. Namun, dengan menggabungkan stimulus permintaan dan reformasi yang meningkatkan produktivitas, pertumbuhan yang tinggi dapat dipertahankan dengan lebih lama dan stabilitas makroekonomi dapat terjaga.

Pertumbuhan jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia sangat bergantung pada kemajuan pelaksanaan reformasi daya saing, yang dapat dikategorikan menjadi reformasi fundamental, efisiensi, dan inovasi. Negara-negara berpendapatan menengah ke atas yang maju memerlukan ketiga jenis reformasi ini untuk mempertahankan daya saing mereka. Indonesia telah berhasil dalam reformasi fundamental, yang memungkinkan pengalihan sumber daya ke sektor-sektor nonpertanian. Namun demikian, negara ini masih tertinggal dari negara-negara setara lainnya yang berkinerja tinggi dalam hal reformasi efisiensi. Hal ini membatasi realokasi sumber daya ke industri dan perusahaan yang lebih produktif. Untuk meningkatkan potensi pertumbuhannya, Indonesia perlu berinvestasi dalam sumber daya manusia, perlindungan sosial, dan mempercepat mobilisasi penerimaan dalam negeri (reformasi fundamental). Pendalaman sektor keuangan, reformasi kebijakan perdagangan, dan keterbukaan investasi, sangat penting untuk mendorong peningkatan produktivitas (reformasi efisiensi). Meskipun telah ada langkah-langkah signifikan, upaya lebih lanjut juga diperlukan untuk mengatasi ketidakefisienan birokrasi dan penegakan peraturan yang tidak konsisten agar dapat menarik investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

II. Pendanaan Visi Indonesia 2045

Indonesia perlu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan untuk berinvestasi pada sumber daya manusia dan fisik guna mencapai ambisi menjadi negara berpendapatan tinggi. Stok sumber daya publik milik negara (seperti aset transportasi, utilitas, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan) dan indeks sumber daya manusia (tingkat kesehatan, gizi, dan pendidikan) masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan dan negara dengan struktur ekonomi serupa, serta jauh di bawah negara-negara maju. Upaya menutup kesenjangan ini dapat meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan sebesar 6 persen yang dibutuhkan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Namun demikian, investasi yang dibutuhkan cukup besar. Sebagian besar dari investasi ini harus dibiayai melalui peningkatan penerimaan pajak, karena peningkatan utang yang signifikan akan berisiko dan akan melanggar batasan undang-undang terkait tingkat defisit dan utang.

Tambahan penerimaan yang signifikan dapat diperoleh dengan mengatasi kesenjangan pajak (*tax gap*), terutama dalam PPN dan PPh Badan. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 sebesar 10,2 persen dari PDB termasuk yang terendah dibandingkan dengan negara-negara setara di kawasan, rata-rata negara berpendapatan menengah, dan negara-negara berkembang besar lainnya. Analisis lintas negara menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia berada sekitar 6 poin persentase dari PDB di bawah negara-negara yang sebanding. Antara tahun 2016 dan 2021, penerimaan pajak yang hilang dari PPN dan PPh Badan rata-rata mencapai 6,4 persen dari PDB. Kekurangan ini disebabkan oleh kombinasi dari desain kebijakan dan tantangan kepatuhan. Perlakuan khusus, pengecualian, dan insentif pajak secara signifikan mempersempit basis pajak, sementara penghindaran pajak dan mekanisme penegakan yang lemah menurunkan tingkat kepatuhan.

Lemahnya kepatuhan merupakan salah satu faktor utama dalam rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, terutama terkait penghindaran pajak yang lazim dilakukan perusahaan-perusahaan formal. Setidaknya seperempat dari perusahaan Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak, yang didorong oleh beberapa karakteristik tertentu. Penghindaran pajak lebih sering terjadi

pada perusahaan non-eksportir, perusahaan yang menganggap administrasi pajak sebagai beban besar, dan perusahaan yang menghadapi persaingan informal yang kuat. Sekitar setengah dari perusahaan melaporkan bahwa mudah untuk menghindari pembayaran PPh Badan atau PPN, sementara banyak yang menganggap kepatuhan terlalu rumit, terutama di kalangan usaha kecil. Tantangan ini mencerminkan kelemahan dalam administrasi pajak dan kurangnya insentif untuk kepatuhan sukarela, yang disebabkan oleh kompleksitas dan rendahnya kesadaran pajak (*tax morale*).

Administrasi perpajakan Indonesia memiliki peluang besar dalam memperkuat penegakan kepatuhan dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Dengan meningkatkan frekuensi dan efektivitas audit, sistem akan lebih baik dalam mengidentifikasi dan menangani penghindaran pajak. Peningkatan proses penegakan untuk mengelola kewajiban pajak yang belum terselesaikan secara efisien akan lebih meningkatkan pengumpulan pendapatan. Penyederhanaan penyelesaian sengketa wajib pajak dan penghilangan ambiguitas regulasi akan membantu menumbuhkan kepercayaan dan transparansi. Selain itu, peningkatan akses ke data pihak ketiga secara tepat waktu merupakan sarana berharga bagi otoritas pajak untuk meningkatkan kualitas audit dan upaya penegakan.

Pengembangan sektor keuangan di Indonesia dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan meningkatkan transparansi informasi dan mendorong formalisasi. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan pasar keuangan yang maju mengumpulkan lebih banyak pajak. Sistem keuangan formal membantu melacak aktivitas, mendeklarasikan aset, dan mengurangi penghindaran pajak. Di Indonesia, di mana sektor keuangan masih terbatas, perluasan akses terhadap kredit dan instrumen keuangan dapat meningkatkan kepatuhan. Perusahaan yang menggunakan pembiayaan bank formal untuk setidaknya 50 persen dari kebutuhan mereka merasa lebih sulit untuk menghindari PPN atau PPh Badan. Namun, ketidakpercayaan terhadap sistem formal membuat dunia usaha enggan menggunakan transfer perbankan yang pada akhirnya membuat upaya penegakan menjadi lebih sulit. Selain itu, perusahaan yang memiliki keterbatasan keuangan dapat terlibat

dalam perencanaan pajak agresif atau penghindaran pajak untuk mengelola arus kas, yang menekankan pentingnya peran sektor keuangan dalam mendorong kepatuhan.

Secara keseluruhan, peningkatan penerimaan pajak memerlukan reformasi yang dapat memperluas basis pajak, memperbaiki administrasi pajak, dan mengatasi kendala struktural yang menghambat kepatuhan. Reformasi untuk memperluas basis pajak dapat dilakukan dengan menurunkan ambang batas pendaftaran untuk PPN agar sesuai dengan standar negara berpenghasilan menengah, yang juga berlaku untuk PPh Final UMKM yang temporer. Sementara untuk UMKM yang berada di bawah ambang batas tersebut, dapat diterapkan PPh Final

yang permanen. Kebijakan khusus PPh Badan, seperti untuk perusahaan jasa konstruksi, perusahaan yang terdaftar di bursa, dan pengecualian PPN yang tidak standar, dapat dihapuskan secara bertahap. Insentif pajak perlu dibuat menjadi lebih strategis, terikat waktu, dan ditinjau secara sistematis. Peningkatan kepatuhan memerlukan manajemen risiko yang lebih baik, menggunakan data pihak ketiga berkualitas tinggi, dan mengintegrasikan sistem pemerintah yang terfragmentasi. Penyederhanaan dan klarifikasi peraturan PPN dapat mengurangi sengketa pajak dan beban administratif. Terakhir, mengatasi kendala struktural ini perlu melibatkan pendalaman sektor keuangan, yang diharapkan memiliki efek sekunder dalam memfasilitasi kepatuhan melalui peningkatan informasi dan formalisasi.

Tabel 1: Indikator-indikator Makroekonomi Terpilih

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Aktual				Proyeksi WB			
Pertumbuhan PDB Riil dan Inflasi, persen perubahan year-on-year								
PDB Riil	-2.1	3.7	5.3	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0
Inflasi Harga Konsumen (Rata-rata, %)	2.0	1.6	4.1	3.7	2.3	2.4	2.6	2.5
Inflasi Harga Konsumen (Akhir periode, %)	1.7	1.9	5.5	2.7	1.7	2.7	2.5	2.5
Konsumsi Pribadi	-2.7	2.0	5.0	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0
Konsumsi Pemerintah	2.1	4.3	-4.5	2.9	5.3	4.2	3.9	5.4
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-5.0	3.8	3.9	4.4	4.5	5.4	6.3	4.8
Ekspor	-8.4	18.0	16.2	1.3	4.1	3.9	3.4	5.8
Impor	-17.6	24.9	15.0	-1.6	2.1	2.9	3.5	4.8
Neraca Keuangan Publik, Pemerintah Pusat, persen PDB								
Pendapatan	10.7	11.8	13.5	13.3	12.6	12.5	12.7	12.8
di antaranya Pendapatan Pajak	8.3	9.1	10.4	10.3	10.2	10.4	10.5	10.5
Belanja	16.8	16.4	15.8	14.9	15.3	15.1	15.3	15.5
Keseimbangan Primer	-4.1	-2.5	-0.4	0.5	-0.5	-0.2	-0.4	-0.5
Keseimbangan Fiskal	-6.1	-4.6	-2.4	-1.6	-2.7	-2.5	-2.6	-2.7
Utang Pemerintah Pusat	39.3	40.7	39.5	39.0	39.3	39.6	39.5	39.6
Neraca Pembayaran, persen PDB kecuali dinyatakan sebaliknya								
Keseimbangan Transaksi Berjalan	-0.4	0.3	1.0	-0.2	-0.9	-1.4	-1.6	-1.6
Ekspor, Barang dan Jasa	16.8	20.8	23.9	21.2	20.9	20.6	20.3	20.4
Impor, Barang dan Jasa	15.1	18.3	20.7	19.2	18.7	18.5	18.5	18.7
Penanaman Modal Asing Netto	1.3	1.5	1.4	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5
Cadangan Devisa Bruto (bulan, impor barang dan jasa)	10.2	8.0	6.0	6.6	6.9	6.7	6.5	6.2
Item Memorandum								
PDB Nominal (IDR triliun)	15,443	16,977	19,588	20,892	22,501	24,105	25,828	27,708
PDB Riil per Kapita (IDR ribu)	39,203	40,237	41,952	43,599	45,313	47,138	49,048	51,146



Australian Government

Supported by funding from the Australian
Government through the Australia-World Bank
Indonesia Partnership (ABIP) program